

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam teori keagenen, hubungan *agency* muncul ketika suatu orang atau lebih mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya pemisahan kepemilikan ini, manajer diberi wewenang untuk mengelola perusahaan seperti dana dan mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan. Atas wewenang yang telah diberikan, pihak pengelola perusahaan (manajemen) diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principal*) dan *principal* akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai nilai jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrol.

Dalam teori keagenan dikemukakan, jika antara pihak - pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency theory*). Hal ini diasumsikan bahwa pemilik dan pengelola cenderung berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan masing - masing, sehingga ada keraguan jika pengelola tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik itupun dapat semakin meningkat terutama karena *principal* (pemilik perusahaan) tidak dapat memonitor aktivitas yang dilakukan

oleh manajemen sehari – hari untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan kepentingan *principal* (pemilik perusahaan) atau tidak. Hal ini disebutkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* dan kondisi perusahaan. Di lain pihak, *agent* sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu sebagai pengelola, seharusnya manajer memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal inilah yang diakibatkan karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris (asimetri informasi).

Adanya asimetri dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Dengan adanya kewenangan yang diberikan, manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja perusahaan atas sumber daya yang telah dipercayakan dalam bentuk laporan keuangan kepada pemilik perusahaan. Dalam laporan keuangan tersebut terdapat informasi laba yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan. Pihak – pihak tertentu seperti pemilik perusahaan (*principal*) atau investor menggunakan informasi laba sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan.

Richardson (1998) menjelaskan bahwa asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, dimana laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menggunakan fakta – fakta yang dibarengi tentang kondisi perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi itu untuk pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan.

Dengan melihat praktek manipulasi terhadap laba yang sering dilakukan oleh manajemen, maka perlu suatu keberadaan peraturan dan pengendalian dalam perusahaan yang secara efektif dapat meminimalkan manajemen laba. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (Muliastuty dan Machfoedz, 2003). Sebagaimana diungkapkan oleh Veronica dan Bachtiar (2004) *corporate governance* adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan *opportunistic* yang dilakukan manajemen. *Corporate governance* menyediakan mekanisme untuk membatasi pemberian fleksibilitas oleh standar akuntansi dalam mencegah praktek manajemen laba dengan mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap operasional perusahaan.

Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan penerapan *corporate governance* yang dianggap efektif. Ada beberapa struktur *corporate*

governance yang dianggap berpengaruh dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba, salah satunya dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer. Dalam hal ini diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Suranta dan Puspa (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu struktur *corporate governance* yang dapat diterapkan dalam membatasi perilaku *opportunistic* manajemen dalam bentuk manajemen laba (*earnings management*).

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua struktur kepemilikan : kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara – negara *continental Europe*. Sebaliknya, di negara – negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (La Porta dan Silanez, 1999).

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu, kelompok atau institusi, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan

yang lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya (Dallas, 2004). Konsentrasi kepemilikan terkonsentrasi dapat berperan sebagai mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi persoalan keagenan, sebab konsentrasi kepemilikan dapat menjadikan pemegang saham pada posisi yang kuat untuk dapat mengendalikan manajemen secara efektif, sehingga mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Pelaksanaan *corporate governance* dapat didukung oleh proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris yang menjalankan sebagian karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui kepercayaan dalam menjalankan fungsi pengawasan, proporsi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang berkualitas, tidak terjadi manajemen laba.

Dengan diterbitkannya peraturan mengenai pembentukan dewan komisaris independen diharapkan kepercayaan investor tumbuh meningkat atas pengelolaan perusahaan sehingga tercipta *good corporate governance*. Hasil penelitian Wedari (2004) dalam Suranta dan Puspa (2005) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi manajemen laba yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa jika anggota dewan komisaris dari

luas meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berdampak dengan makin rendahnya manajemen laba.

Penelitian Chtourou et al (2001) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian Beasley (1996), Yermarck (1996) dan Jensen (1993) yang menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian " Arief dan Bambang (2007)" yang berjudul " Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba ". Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan. Dalam penelitian kali ini ditambahkan variabel kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dari penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) yang berjudul " Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur". Dalam penelitian sebelumnya yaitu Boediono (2005) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu menjadi mekanisme *corporate governance* dalam membatasi manajemen laba. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Madiastuty dan Machfoedz (2003) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat diterapkan dalam membatasi *earnings management*. Struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dianggap tidak mampu

menjadi mekanisme *corporate governance* dalam membatasi manajemen laba, akan tetapi hasil penelitian ini masih kontradiktif dengan teori yang dikemukakan oleh Utama dan Veronica (2005) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat membatasi *earnings management*.

Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba menguji kembali pengaruh struktur *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komiaris terhadap manajemen laba. Diharapkan dengan adanya variabel penelitian yang berbeda maka hasil penelitian ini dapat lebih bervariasi, akurat dan *up to date*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba ?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba ?
3. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba ?
4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan penjelasan pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba
2. Untuk menguji dan memberikan penjelasan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji dan memberikan penjelasan pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
4. Untuk menguji dan memberikan penjelasan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak manajemen perusahaan. Dengan penelitian ini diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan dengan jujur dan terbuka.
2. Bagi pihak investor. Dengan penelitian ini diharapkan mendorong pihak investor untuk lebih memperhatikan informasi keuangan yang disajikan perusahaan.
3. Bagi lembaga yang terkait pasar modal. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tercipta pasar modal yang efisien dan tanggap terhadap manipulasi yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

4. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pustaka mengenai *corporate governance* dan manajemen laba (*earnings management*).